

**FAKTOR FAKTOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PENYERAPAN  
ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJENE**

**TESIS**

**OLEH  
ACO FIRMAN  
NIM : 4618104037**



**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDY MANAJEMEN KEUANGAN  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Faktor Faktor Pengelolaan Keuangan dan Pengaruhnya  
Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah  
Kabupaten Majene

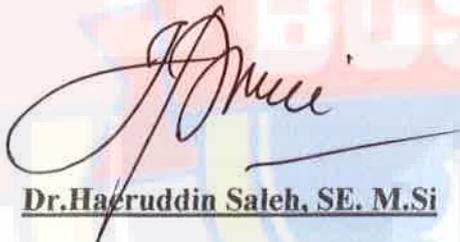
Nama Mahasiswa : Aco Firman

NIM : 4618104037

Program Study : Manajemen Keuangan

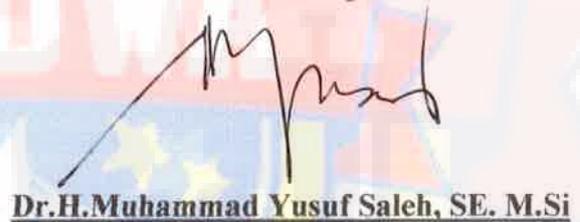
Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Haeruddin Saleh, SE, M.Si

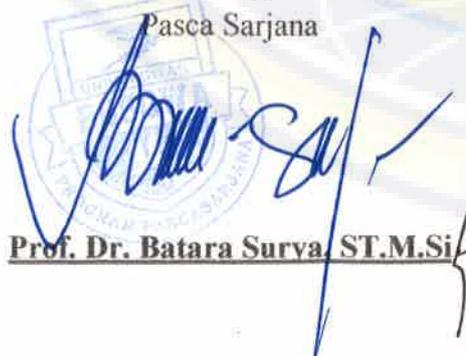
Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si

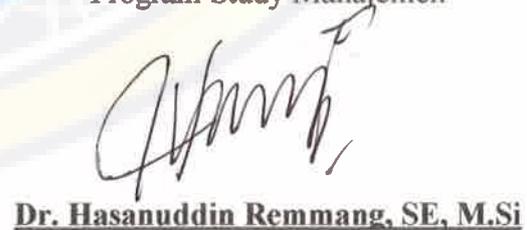
Mengetahui :

Direktur  
Pasca Sarjana



Prof. Dr. Batara Surya, ST.M.Si

Ketua  
Program Study Manajemen



Dr. Hasanuddin Remmang, SE, M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Tanggal :

Tesis atas nama : Aco Firman

NIM : 4618104037

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana Untuk Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Manajemen

Ketua : Dr. Haeruddin Saleh, SE M.Si

Sekretaris : Dr.H.Muhammad Yusuf Saleh,SE.M.Si

Anggota Penguji : 1. Dr. Herminawaty Abubakar, SE, M.Si

2. Dr. Muchtar Sapiri, SE, M.Si, Ak



Makassar,  
Direktur  
  
Prof.Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

## **PERYATAAN ORISINAL TESIS**

**Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di Dalam naska tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka**

**Apabila ternyata di dalam naska Tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur ciplakan saya bersedia tesis ini di batalkan, serta di Proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 2 Tahun2003 Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70)**

**Makassar,**

**Mahasiswa**

**ACO FIRMAN  
NIM 4618104037**

## PERYATAAN ORISINAL TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di Dalam naska tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naska Tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur ciplakan saya bersedia tesis ini di batalkan, serta di Proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 2 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70)

Makassar,



Mahasiswa

ACC IRMAN

NIM 4618104037

## **RIWAYAT PENULIS**

**ACO FIRMAN Lahir di Majene Tanggal 17 Oktober 1975 anak dari Bapak H. Muhammad Sunusi Parusi dan Ibu Hj. Sitti Raodah, SD Neg 13 Lembang Kabupaten Majene Lulus Tahun 1987, SMP Neg 4 Majene Lulus Tahun 1990 SMA Neg 1 Majene Lulus Tahun 1993, Strata Satu SI di STMIK Dipanegara Makassar Lulus Tahun 2002**

**Pengalaman Kerja Sebagai Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahn Daerah Inspektorat Kabupaten Majene Mulai Tahun 2006- sampai Sekarang**

## ABSTRAK

**Aco Firman**, Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majen, (Dibimbing Oleh Haeruddin Saleh, dan Muhammad. Yusuf Saleh).

Penelitian berlatarbelakang Lambatnya penyerapan anggaran di setiap tahun berjalan sehingga di tuding sebagai buruknya mekanisme pengelolaan anggaran di pemerintah kabupaten majene, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan menginterpretasi, Pengaruh Mekanisme Pengelolaan Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, Populasi dan sampel 120 orang pegawai yang berkaitan dan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Majene, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung dan pemberian kuesioner dan Studi Pustaka, data hasil penelitian ini akan di analisis melalui alat uji statistic dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1 Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Majene karena pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene telah menggunakan Perencanaan berbasis Aplikasi (E-Planning), dengan perencanaan yang baik dan terukur akan menghasilkan *Output* dan *Outcome* yang baik, salah merencanakan berarti merencanakan kegagalan 2. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kabupaten Majene karena sumber Daya Manusia yang ada di Organisasi Perangkat Daerah telah mengikuti Diklat – Diklat yang berkaitan dengan Keuangan dengan latar belakang Pendidikan yang sesuai di bidang pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan akuntabilitas Keuangan yang baik dan handal 3. Reformasi Birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kabupaten Majene karena dengan adanya Reformasi Birokrasi di bidang Struktur organisasi dan penempatan pejabat sesuai dengan keahlian masing-masing (*The Right Man on The Right job*) 4. Proses Lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran karena di Kabupaten Majene telah Menggunakan Aplikasi Sirup dan E-Purcesing dan E-Plening sehingga semua pengadaan barang dan jasa melalui Aplikasi.

**Kata Kunci :** Perencanaan Anggaran berbasis Kinerja dan Aplikasi.

## ***ABSTRACT***

**Aco Firman**, Factors of Financial Management and Its Impact on Budget Absorption in the Majene Regency Government (Supervised by Haeruddin Saleh, and Muhammad. Yusuf Saleh).

Research background The slow absorption of the budget in each year so that it is accused of being a poor budget management mechanism in the Majene regency government. employee related to and influential on budget management in the Majene Regency Government, the method of data collection using the method of direct interviews and questionnaires and literature study, the data from this research will be analyzed through statistical test equipment using SPSS software. The results of this study indicate that: 1 Budget planning has a positive and significant effect on Budget Absorption in the Majene Regency Government because the Majene District Government has used Application-based Planning (E-Planning), with good and measurable planning will produce a good Output and Outcome , wrong planning means planning failure 2. Human Resources have a positive and significant impact on Budget Absorption in Majene Regency because Human Resources in the Regional Apparatus Organization have followed Education and Training related to Finance with appropriate Educational background in the field of financial management so as to produce good and reliable Financial accountability 3. Bureaucratic Reform has a positive and significant impact on Budget Absorption in Majene Regency because with the Bureaucratic Reform in the field of Organizational Structure and the placement of officials according to respective expertise gan (The Right Man on the Right Job) 4. The Bid Process has a positive and significant effect on Budget Absorption because in Majene Regency has used the Syrup Application and E-Purchasing and E-Planning so that all procurement of goods and services through the Application.

**Keywords:** Performance and Application-based Budget Planning.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	20
2.3 Hipotesis Penelitian .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	25
3.3 Populasi dan Sampel .....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5 Metode Analisi Data .....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Karakteristik Responden.....	40
4.1.2 Deskriptif Variabel .....	41
4.2 Pengujian Hipotesis .....	46
4.2.1 Pengujian Validasi.....	46
4.2.2 Uji Realibilitas .....	49
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	56
4.3.1 Uji Parsial (t) .....	57
4.3.2 Uji Simultan (F) .....	59
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	61

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran Penelitian .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **KUESIONER**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah daerah kabupaten Majene, kerap kali di jadikan sebagai gambaran buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyerapan anggaran sendiri memang sebagai hal yang sangat penting untuk menilai terlaksannya program kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran. Akan tetapi sejatinya kinerja Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran. Ketidak tercapaian serapan anggaran setiap tahun memang akan berakibat tidak terlaksananya secara keseluruhan program kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Majene

Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran menjadi fenomena klasik di pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan, Walaupun tingginya realisasi anggaran bukan merupakan tolak ukur utama dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majene. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkanlah system penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat

*incrementalism* dan struktur susunan anggarannya bersifat *line item*. Dalam system tradisional penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. *Performance based budgeting* dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas daerah sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. penganggaran berbasis kinerja menetapkan kinerja sebagai tujuan utama sehingga diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupaindikator kinerja (*performance indicators*).

Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (*targets*) yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ketiga pokok bahasan dalam *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektifis) terkait satu dengan yang lain. Ekonomis membahas mengenai masukan (input), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten

Majene sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (*audited*) dalam dua tahun terakhir (2018-2019) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja Kabupaten Majene tahun 2018-2019 belum mencapai 100% yaitu masing-masing untuk Tahun 2018 hanya mencapai 90.73% dan untuk Tahun 2019 hanya mencapai 92.11 %.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Majene tahun 2018-2019, dapat dilihat penyerapan anggaran Kabupaten Majene pada tahun 2018 di triwulan empat dengan total anggaran belanja sebesar Rp 309.944.582.621.88, hingga akhir Desember 2018 (akhir triwulan keempat) realisasi keuangan yang mampu diserap untuk pelaksanaan program kegiatan adalah sebesar 89.65%. Realisasi anggaran belanja di triwulan keempat seharusnya telah mencapai 100% dari total anggaran belanja jika dilihat dari rencana pencairan anggaran kas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2018 IV masing-masing sebesar 20%; 20 %; 30%; dan 30%. Begitu juga yang terjadi pada tahun 2019 tingkat penyerapan anggaran per triwulan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene, penyerapan anggaran tidak optimal. sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran Kab.Majene**  
**Tahun 2018-2019**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2018	179.676.882.908.38	1	106.110.242.616.00	49.96
	206,551.948.404.38	11	198.255.230.755.00	92.60
	223.323.361.516.38	111	240.169.539.696.00	122.79
	311.954.256.317.67	IV	309.944.582.621.88	86.65
2019	84.294.380.430.00	1	80.345.278.617.00	95.70
	223.011.071.995.00	11	220.011.897.521.00	94.90
	229.740.714,374.00	111	229.740.714,374.00	100
	231.216.154.167.00	IV	225.543.768.421.76	97.00

*Sumber Data : Laporan Reviu Penyerapan Anggaran Inspektorat Kab.Majene*

Untuk tahun 2018 penyerapan anggaran belanja Kabupaten Majene juga masih rendah Serapan anggaran belanja langsung hingga Juli 2018 baru terealisasi 20,3%. Ini artinya masih banyak kegiatan yang belum di laksanakan sehingga serapan danahnya belum maksimal. Penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terhadap Penyerapan anggaran telah dilakukan sebelumnya oleh Nova Dwiyana(2017) menghasilkan penelitian bahwa secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, peraturan, sumber daya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik secara simultan mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber dayamanusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Pada penelitian yang lain seperti yang dilakukan oleh Rifai, *et. Al*(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumberdaya

manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda untuk variabel independen terhadap penyerapan anggaran. Untuk factor sumber daya manusia, perencanaan, peraturan dan koordinasi hasil penelitian Nova Dwiyana (2017)

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada, memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran.
3. Apakah Reformasi Birokrasi berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran.
4. Apakah Proses Lelang berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap Peyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah
2. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Peyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah
3. Pengaruh Repormasih Birokrasi terhadap Peyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah
4. Pengaruh Proses Lelang terhadap Peyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang menjadi permasalahan yang dan tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah intelektual dan mengembangkan wawasan berfikir dengan konsep ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.
2. Bagi objek Penelitian dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dalam penyerapan anggaran di OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya (Mardiasmo, 2009). Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Noviwijaya (2013) penyerapan anggaran SKPD merupakan “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan yang telah diselesaikan, dengan anggapan bahwa fisik pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Nugroho dan Ananda, 2013). Penyerapan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan seberapa besar anggaran yang terserap dalam sebuah program kegiatan yang telah direncanakan, namun juga mengukur efisiensi anggaran serta efektivitas anggaran tersebut. Kuswoyo (2011) selain kualitas perencanaan anggaran, kualitas SDB penyerapan anggaran juga dipengaruhi pelaksanaan program kegiatan. Dalam pelaksanaan anggaran, persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam internal satuan kerja meliputi keterlambatan penetapan surat keputusan pejabat pembuat komitmen

(PPK) pejabat pengelola keuangan, dan kebiasaan pengelola anggaran menunda pekerjaan, serta tidak adanya *reward* dan *punishment* bagi keberhasilan/kegagalan pengelolaan keuangan di satker juga menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran (Miliasih, 2012). Siswanto dan Rahayu, (2010), Maulana (2011), Kuswoyo (2011), Herriyanto (2012), Arif (2012) dan Putri (2014) membuktikan bahwa faktor SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memberi pengaruh bagi penyerapan anggaran SKPD. Suhipna, (2013) mengemukakan beberapa factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor individu, organisasi dan psikologis. Faktor individu terkait pada bagaimana seorang pegawai yang menangani langsung anggaran memberikan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya. Seringkali pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang memadai menduduki jabatan penting dan diberikan tanggungjawab terhadap realisasi anggaran. Faktor organisasi juga menentukan bagaimana anggaran itu disusun melalui perencanaan yang tepat sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Faktor psikologis ikut mempengaruhi penyerapan anggaran. Dimana tekanan dari pihak luar juga memberikan kontribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran.

## **2.1.2 Faktor Faktor yang mempegaruhi Penyerapan Anggaran**

### **2.1.2.1 Perencanaan Anggaran**

Faktor terpenting dalam penyerapan anggaran agar dapat lebih maksimal adalah perencanaan. Permasalahan yang timbul dalam perencanaan anggaran disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa

tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan (Septianova dan Helmy, 2013). Selain itu, perencanaan kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaannya (Tunggal, 2011). Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Notoatmodjo (2003) “perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada rencana tersebut”. Untuk mengimplementasikan perencanaan atas suatu kegiatan tentu dibutuhkan anggaran. Mardiasmo (2009) anggaran merupakan "pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial". Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran diantaranya:

1. Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran
3. Salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen anggaran
4. Penyusunan pagu anggaran yang tidak sesuai harga pasar
5. *Term of Reference*(TOR) salah/tidak lengkap
6. Kerangka Acuan Kerja salah/tidak di buat
7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak di dukum oleh harga pasar setempat

8. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak sesuai dengan satuan biaya

Perencanaan anggaran yang akurat akan mempermudah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011).

Toni (2011) meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung, hasilnya menunjukkan bahwa salah satu factor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran lemahnya perencanaan anggaran. Demikian pula pada penelitian Siswanto dan Rahayu, (2011) serta Murtini (2009) menunjukkan lemahnya serapan anggaran dikarenakan lemahnya perencanaan. Bakara (2000) menemukan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta belum tercapai sesuai yang diharapkan. Utari (2009) dalam studi kualitatifnya meneliti kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, hasilnya menunjukkan bahwa :

1. Struktur SKPD belum memberikan ruang yang cukup bagi perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi
2. Tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan
3. kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai yang berhubungan pengelolaan keuangan. Untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal

Proses perencanaan kegiatan dalam penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan dan penganggaran sudah mulai berjalan. Setiap satuan kerja yang akan mengajukan sebuah kegiatan, harus menyusun *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai syarat-syarat pendukung administratif sesuai jenis kegiatan masing-masing. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali (BPKP, 2011). Secara empirik, hal ini juga telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan Bakara (2000) dan Akadira (2010) yang mengungkapkan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan.

### **2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada beberapa SKPD disebabkan SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten dan perencanaan anggaran yang tidak matang (Maulana, 2011). Penyerapan anggaran SKPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja baik. *United Nations Development Programs* (2008) mengartikan kualitas SDM sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang

dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu SKPD sebagai penerima amanah (*steward*) dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemberi amanah (*principal*) maka serapan anggarannya akan semakin baik, karena SDM-nya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Penelitian Miliasih (2012) menemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas baik pejabat pengelola maupun staf dapat mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. Hasil penelitian Arif & Halim (2013) menunjukkan bahwa penempatan pegawai memerlukan perhatian yang penuh dari pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Utari (2009) dalam studi menemukan bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal.

#### **2.1.4 Reformasi Birokrasi**

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Makna reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigam dan peran baru.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat:

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan
2. Menjadikan Negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi.

5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan strategis

Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-RB No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka itu, ditetapkan Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas *output*

dan *outcome* pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional. Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.

#### **2.1.5 Proses Lelang**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia semua paket kegiatan harus dilaksanakan melalui proses lelang namun sebelumnya dilakukan pengimputan semua paket belanja ke dalam Aplikasi Sirup pada Bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Majene

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya:

1. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
2. Jenis kontrak
3. Sumber dana
4. Metoda pengadaan
5. Nilai kontrak
6. Standar-standar Nasional Indonesia

Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011) antara lain:

- a. Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa.
- b. Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir).
- c. Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Zarinah (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap tingkat penyerapan anggaran OPD Kabupaten Majene. Rifai, *et. al* (2016) melakukan penelitian mengenai analisis yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Majene Pemkab). Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran. Ruwaida (2018) melakukan penelitian mengenai analisis yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat .

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, peraturan, sumberdaya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat , sedangkan secara parsial perencanaan, peraturan, sumber daya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja Malahayati (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran OPD Kabupaten Majene (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Pemerintah Majene. Disimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD Kabupaten Majene pada Pemerintah OPD Kabupaten Majene. Utomo (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi pegawai, reformasi birokrasi, dan disiplin kerja terhadap motivasi dan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, reformasi birokrasi dan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sedangkan kompetensi pegawai berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .Perencanaan anggaran, kompetensi pegawai, reformasi birokrasi, dan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan

anggaran. Motivasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji secara serempak (Uji F) membuktikan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, kompetensi pegawai, reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sulawesi Barat.

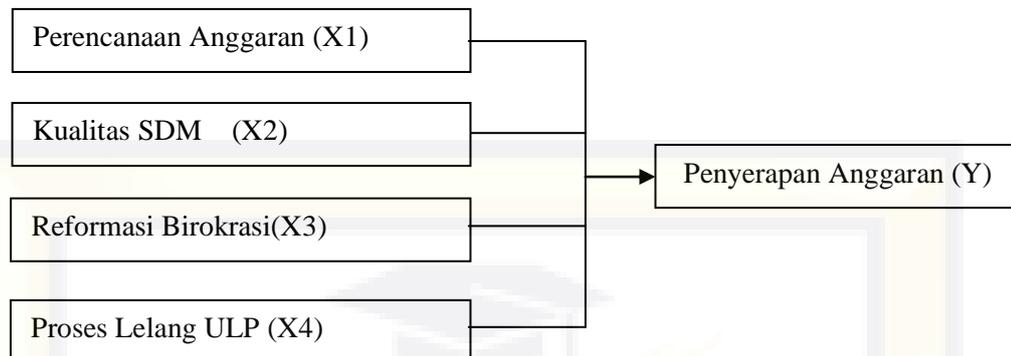
Seftianova (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, baik dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode. Sedangkan akurasi perencanaan kas tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran baik dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala badan, sekretaris dinas, kepala biro keuangan dan *snowball informan* yang ada hubungannya dengan penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang mengakibatkan terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011. Walaupun ada sebagian kecil faktor yang hampir sama namun memiliki karakteristik faktor yang berbeda. Faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor regulasi, faktor tender/lelang

dan faktor lambatnya pengesahan APBD tahun 2011 masih merupakan faktor-faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011. Kuswoyo (2012) melakukan penelitian mengenai analisis atas faktor-faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksana anggaran, faktor pengadaan barang/ jasa, faktor internal satuan kerja, faktor lainnya diluar dari model. Herriyanto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh keempat variabel independen. Keempat faktor tersebut mampu menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 71,43 persen, sedangkan sisanya sebesar 28,57 persen dijelaskan oleh faktor lainnya diluar dari keempat faktor tersebut.

## **2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang diuji secara simultan dan parsial, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konsep yang dibangun gambar 3.1 di atas menunjukkan arah hubungan pengujian pengaruh variabel perencanaan anggaran (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), Reformasi Birokrasi (X3), Proses Lelang (X4) terhadap penyerapan anggaran (Y)

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan kegiatan yang kurang matang akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali. Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Perencanaan anggaran yang akurat akan mempermudah pelaksanaan anggaran. Penelitian terdahulu Toni (2011) menemukan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung, hasilnya menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran lemahnya

perencanaan anggaran. Perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan.

### **2.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap**

#### **Penyerapan Anggaran**

Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu SKPD maka serapan anggarannya akan semakin baik, karena SDM-nya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Penelitian terdahulu yang dilakukan Heriyanto (2012) menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia memberi pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam mendukung kinerja suatu instansi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada efektifitas kinerja satuan kerja. Penyerapan anggaran SKPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja juga baik.

### **2.3.3 Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran**

Agenda reformasi birokrasi nasional menempatkan pelayanan publik pada salah satu arah perubahan yang mendasar untuk merubah stigma pelayanan publik pemerintah menjadi pelayanan prima. Reformasi bidang keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket undang-

undangan di bidang keuangan negara. Dengan adanya 3 (tiga) paket perundang-undangan tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur. Pembinaan pada reformasi birokrasi, dapat mendukung percepatan penyerapan anggaran agar pembangunan bisa cepat terlaksana dan masyarakat juga bisa merasakan dampaknya. Utomo, *et. al*(2014) menghasilkan penelitian bahwa reformasi birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

#### **2.3.4 Pengaruh Proses Lelang terhadap Penyerapan Anggaran**

Proses lelang paket kegiatan adalah proses yang sangat krusial dan menentukan untuk melakukan realisasi serapan dana/anggaran yang telah di programkan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene

Pada setiap satuan kerja perangkat daerah harus lebih awal membuat HPS pada setiap Paket kegiatan yang akan di laksanakan di SKPD dengan melakukan survei harga pasar untuk melakukan/membuat rancangan awal kontrak sebelum melakukan proses lelang di Bagian ULP sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Nawawi (2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok

Menurut format penelitian dan tingkat eksplanasinya penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menyelidikikemungkinan hubungan sebab akibat yang ada, mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Supriana, 2016).

##### **3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Januari–Februari 2020, sesuai jadwal penelitian pada lampiran 1.

### **3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Realisasi anggaran merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBD. Anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Saat ini di Kabupaten Majene terdapat beberapa OPD yang mengalami penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran yang rendah ini disebabkan selain karena tidak dijalankannya program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesainya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilihat apa saja factor/hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

#### **3.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu:

##### **3.2.1.1 Perencanaan Anggaran**

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan. Berkaca pada sistem penganggaran yang sedang kita

laksanakan saat ini (yang menghasilkan produk dokumen anggaran/RKA-KL) dan sistem perencanaan (yang menghasilkan produk dokumen perencanaan/RKP) maka, kedua produk tersebut harusnya ada benang merah secara substansi. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan beserta informasi di dalamnya (*outcome* dan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan) seharusnya dapat dioperasionalkan dalam dokumen penganggaran. Hal tersebut tidak terlihat selama ini, dikarenakan masih sering terjadi adanya anggaran kegiatan yang diblokir sehingga menyebabkan perencanaan-perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan perlu dilakukan revisi. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang ada pada kedua dokumen tersebut hanya sebatas pada nama program dan kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka faktor dokumen perencanaan memiliki hubungan dengan penyerapan anggaran. Pada penelitian ini akan dilihat apakah dokumen perencanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran atau tidak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak sembilan pertanyaan dalam sebuah kuisioner.

*X1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

### **3.2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia**

SDM adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi. SDM memiliki hubungan dengan perencanaan, karena terdapat tujuan dari perencanaan SDM yang diantaranya adalah untuk kepentingan

individu, kepentingan organisasi dan kepentingan nasional. SDM juga merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pada penyerapan anggaran SDM memiliki hubungan yang erat mengingat dalam ruang lingkup suatu SKPD SDM sangat diperlukan sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa yang sebaiknya memiliki sertifikat dan berkompotensi karena jika SDM dalam suatu SKPD sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang berkompoten dan tidak memiliki sertifikat maka dapat menyebabkan pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sehingga faktor SDM menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala dengan berapa banyak pertanyaan yang di ajukan kepada responden

*X<sub>2</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

### **3.2.1.3 Repormasi Birokrasi**

Teori penetapan tujuan (*goal setting*), merupakan penetapan sasaran (*goal*) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi, sehingga setiap pegawai akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sehingga akan meningkatkan ketepatan anggaran Komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dapat ditimbulkan dari partisipasi anggota dalam menentukan, merumuskan dan merencanakan program yang akan dijalankan yang akan

memberikan hasil yang optimal pada outputnya. Sehingga komitmen organisasi dan capaian atas pelaksanaan anggaran merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan. bahwa komitmen terhadap tujuan merupakan derajat komitmen individu untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan aspek kunci dari teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*).

Faizzah dan Mildawati (2007) berpendapat komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi akan memicu tumbuhnya komitmen organisasional sehingga individu akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi (Latuheru, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen organisasi maka tujuan organisasi lebih mudah tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridani (2014) tentang analisis penyerapan anggaran belanja daerah menghasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya, penelitian Arif dan Halim (2013) mengemukakan bahwa salah satu penyebab keterlambatan pengesahan APBD 2011 di Kabupaten/kota adalah karena rendahnya komitmen organisasi baik pada kalangan eksekutif maupun legislative dalam menjalankan amanah dan tugas organisasi.

Dalam rangka itu, ditetapkan Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas *output* dan *outcome* pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional. Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan. Dari beberapa bukti empiris diatas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

*X3 : Reformasi birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

#### **3.2.1.4 Proses lelang**

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik). Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. (Wikipedia.org). Dokumen

pengadaan berisi pengumuman mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, serta penanggung jawab kegiatan pengadaan. Selain itu berisi undangan kepada penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan, bentuk penawaran dan perjanjian, syarat-syarat kontrak, data kontrak, spesifikasi teknis dan daftar kuantitas dan harga. Dokumen pengadaan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena didalam dokumen pengadaan tertuang daftar kuantitas dan harga suatu barang yang akan dibeli untuk keperluan suatu instansi. Sehingga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebaiknya dilakukan melalui survei pasar agar tidak menyebabkan ketidaksesuaian harga suatu barang dalam proses pengadaan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga dokumen pengadaan menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak tiga pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

*X4 : Proses Lelang berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

### **3.2.2 Variabel Dependen**

#### **3.2.2.1 Penyerapan Anggaran**

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator kegagalan birokrasi, karena penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Faktor- faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran akan dibahas dalam penelitian ini. Pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu masih sering terjadinya penyerapan anggaran yang belum maksimal. Untuk mengatasi agar penyerapan anggaran yang rendah tidak terjadi lagi, pemerintah Provinsi Bengkulu mengadakan rapat evaluasi secara rutin guna mengetahui kendala atau persoalan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga persoalan tersebut dapat dicari jalan keluarnya secepat mungkin dan tidak menghambat proses pembangunan. Variabel penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan skala likert antara 1 sampai 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran dan skor tertinggi (5) menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi.

### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2016 Daerah Kabupaten Majene jumlah OPD di Kabupaten Majene adalah 56 ( Lima puluh Enam) SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Korpri Inspektorat, Satpol PP, 20 (dua puluh) Dinas, 7 (tujuh) Badan dan 8 (delapan) Kecamatan. 20 (Dua Puluh ) Kelurahan Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan) dan dari 56 (lima puluh enam) SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Majene. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus sehingga jumlah sampel sebanyak  $2 \times 56$  SKPD yaitu 120 responden.

Tabel 3.3 Populasi Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretariat Daerah	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sekretariat Korpri	Dinas Pertambangan dan Energi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pendapatan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	Kantor Satuan Polisi Pamongraja
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Badan Kependudukan dan KB Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
Inspektorat	Kecamatan Banggae
Dinas P. ekerjaan Umum	Kecamatan Banggae Timur
Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Pamboang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kecamatan Sendana
Dinas Pendidikan	Kecamatan Tammerodo sendana
Dinas Kesehatan	Kecamatan Tubo Sendana
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan	Kecamatan Malunda
Dinas Pertanian dan Peternakan	Kecamatan Ulumanda
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	

Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Perangkat dan Struktur Organisasi Daerah

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dalam sebuah kuisisioner yang akan diisi oleh responden. Butir pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuisisioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Kuisisioner akan diantarkan langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuisisioner akan langsung diambil

kembali setelah diisi oleh responden. Namun, jika tidak memungkinkan maka kuisisioner akan diambil paling lambat 1 minggu setelah penyerahan atau sesuai waktu yang telah disepakati dengan responden. Kuisisioner yang diajukan kepada 56 SKPD diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyulu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyulu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Diskoperindag dan UKM), Dinas Pendidikan (Diknas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kuisisioner diukur menggunakan skala likert dengan menggunakan penilaian yang pertama yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan penilaian sangat sering, sering, kadang-kadang, pernah dan tidak pernah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lubis (2015) menyebutkan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian tersebut. Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang bisa diperoleh dari instansi-instansi terkait (Supriana, 2016). Untuk pengumpulan data primer akan digunakan kuisisioner yaitu pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Indikator dan kuisisioner yang berhubungan dengan variabel perencanaan anggaran dan variabel sumber daya manusia dirancang dan diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu

penelitian oleh Zarinah (2016), Malahayati (2015) dan Herryanto (2012). Indikator dan kuesioner yang berhubungan dengan reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi dirancang dan diadopsi berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderating. Pengujian untuk hipotesis pertama menggunakan metode regresi berganda dan untuk hipotesis kedua dengan pengujian efek moderating. Metode ini membutuhkan 2 persamaan regresi, yang pertama bertujuan menguji pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan yang kedua menguji apakah variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### 1. Model untuk hipotesis pertama (H1):

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Anggaran (*Dependent Variable*)

b<sub>0</sub> = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = Koefisien si Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X<sub>1</sub> = Perencanaan Anggaran (*Independent Variable*)

X<sub>2</sub> = Kualitas SDM (*Independent Variable*)

X<sub>3</sub> = Reformasi Birokrasi (*Independent Variable*)

X<sub>4</sub> = Proses Lelang (*Independent Variable*)

E = error

## 2. Model untuk hipotesis kedua (H2):

Model hipotesis kedua yaitu untuk menguji kemampuan variabel moderatingmemoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dilakukandengan metode residual terdiri dari dua tahapan yaitu:

Tahap 1. Seluruh variabel independen diregresikan dengan variabel moderating agardiketahui pengaruhnya. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Z = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Tahap 2 Angka residual dari hasil persamaan pertama akan ditransformasikan untukmenghasilkan nilai residual absolut. Nilai residual absolut tersebut akandiregresikan dengan variabel dependen yaitu penyerapan anggaran denganpersamaan sebagai berikut :

$$|e| = b_0 + b_6 Y$$

Keterangan :

- Y = Penyerapan Anggaran (*Dependent Variable*)
- Z = Motivasi (*Moderating Variable*)
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub>, = Koefisiensi Regresi Variabel Independen
- b<sub>6</sub> = Koefisiensi Regresi Variabel Moderating
- X<sub>1</sub> = Perencanaan Anggaran (*Independent Variable* )
- X<sub>2</sub> = Kualitas SDM
- X<sub>3</sub> = Reformasi Birokrasi (*Independent Variable* )
- X<sub>4</sub> = Proses Lelang(*Independent Variable* )
- (*Independent Variable*)
- e = error

$|e|$  = Nilai residual Uji Residual digunakan untuk mencegah terjadinya multikolonieritas (Ghozali, 2016).

Seluruh variabel independen harus diregresikan. Uji residual dapat memperlihatkan apakah suatu variabel dapat disebutkan sebagai variabel Independen atau variable Defenden, apabila suatu variabel setelah dilakukan uji residual diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti signifikan dan koefisien.

### 3.5.1 Uji Kualitas Data

#### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan pengujian berbeda. Instrument berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan atau pernyataan kuesioner dari Korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson yang dilihat dari  $r$  hitung untuk tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari ( $>$ )  $r$  tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid tetapi sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari ( $<$ )  $r$  tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner tidak valid. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013).

### 3.5.1.2 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas adalah alat uji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Ghozali (2016) menyatakan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang dilakukan dengan cara memberikan kuesioner (pertanyaan) yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah responden tetap konsisten dengan jawabannya.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja dilakukan dengan cara hanya sekali saja kuesioner diberikan kepada responden dan kemudian hasilnya dibandingkan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *oneshot* atau pengukuran sekali saja dan untuk pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2016).

### 3.5.2 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis mengenai perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kabupaten Majene baik secara simultan maupun secara parsial, dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

### 3.5.2.1 Uji F (F-Test)

Untuk menguji hipotesis secara simultan dilakukan dengan uji F, Pengujian ini dilakukan untuk melihat semua variabel independen mempunyai pengaruh secara serempak (simultan) terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan uji F adalah :

$H_0 : \beta = 0$  Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara serempak tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

$H_1 : \beta \neq 0$  Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara serempak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Uji F dalam penelitian ini tingkat keyakinan menggunakan  $\alpha 5\%$ , sehingga kriteria pengujian adalah :

$P \text{ Value (Sig)} < 0,05 = H_0$  (terima  $H_1$  tolak  $H_0$ )

$P \text{ Value (Sig)} > 0,05 = H_1$  (terima  $H_0$  tolak  $H_1$ )

### 3.5.2.2 Uji t (t-Test)

Untuk menguji hipotesis secara parsial dilakukan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan uji t adalah :

$H_0 : \beta = 0$  Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

$H_1 : \beta \neq 0$  Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai signifikansi  $\alpha$

Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh dengan tingkat kepercayaan 95% yang signifikan berdasarkan pada  $\alpha$  5%. Kriteria pengujian:

$P \text{ Value (Sig)} < 0,05 = H_0$  (terima  $H_1$  tolak  $H_0$ )

$P \text{ Value (Sig)} > 0,05 = H_1$  (terima  $H_0$  tolak  $H_1$ )

### 3.5.2.3 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Karakteristik Responden

###### a. Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki – Laki	96	80
Perempuan	24	20
<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden jenis kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 96 orang atau 80%, sedangkan sisanya 24 orang atau 20% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya sebagai besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

###### b. Deskriptif Berdasarkan Umur

Deskripsi berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Umur**

Usia	Frekuensi	Presentasi (%)
20-30 Tahun	24	20
31-45 Tahun	62	52
46-55 Tahun	26	22
Lebih dari 55 Tahun	8	6
<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia terbesar berada pada responden berusia 31-45 tahun sebanyak 62 orang atau 52%. Responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 26 orang

atau 22%. Kemudian responden yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 8 orang atau 6%. Sedangkan responden berusia 20-30 tahun sebanyak 24 orang atau 20%.

c. Deskriptif Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
SLTA	8	6
D3	0	0
S1	98	82
S2	14	12
S3	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terbesar berada responden S1 sebanyak 98 orang atau 82%, responden yang tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 6%, responden yang tingkat pendidikan S2 sebanyak 14 orang atau 12%. Dari 120 Responden. Sedangkan responden yang tingkat pendidikan D3 dan S3 tidak ada (0%).

#### 4.1.2 Deskriptif Variabel

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten majene terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3) dan Proses Lelang (X4). Sedangkan Penyerapan

Anggaran (Y) adalah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Kabupaten Majene dan Data Sekunder yang diperoleh dari hasil hitungan program SPSS Versi 26 For Windows melalui hasil jawaban pegawai yang diberikan melalui koesioner.

a. Perencanaan Anggaran (X1)

Perencanaan anggaran merupakan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dimulai dari RKPD sampai RKA SKPD.

Deskripsi terhadap variabel perencanaan anggaran, dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator variabel perencanaan anggaran dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tanggapan Responden atas Perencanaan Anggaran**

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X1.1	17 (14,16%)	40 (33,33%)	25 (20,83%)	24 (20%)	14 (11,66%)	120 (100%)
X1.2	14 (11,66%)	63 (52,5%)	24 (20%)	17 (14,16%)	2 (1,66%)	120 (100%)
X1.3	34 (28,33%)	27 (22,5%)	13 (10,83%)	31 (25,83%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X1.4	15 (12,5%)	41 (34,16%)	24 (20%)	25 (20,83%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X1.5	16 (13,33%)	49 (40,83%)	23 (19,16%)	24 (20%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X1.6	26 (21,66%)	32 (26,66%)	22 (18,33%)	21 (17,5%)	19 (15,83%)	120 (100%)
X1.7	24 (20%)	32 (26,66%)	28 (23,33%)	26 (21,66%)	10 (8,33%)	120 (100%)
X1.8	22 (18,33%)	51 (42,5%)	22 (18,33%)	21 (17,5%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X1.9	15 (12,5%)	46 (38,33%)	27 (22,5%)	25 (20,83%)	7 (5,83%)	120 (100%)
Rata-rata	16,94%	35,27%	19,25%	17,49%	8,7%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai perencanaan anggaran, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 35,27%.

b. Deskripsi variabel kualitas SDM

Kualitas SDM merupakan kemampuan yang dimiliki oleh ASN yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Deskripsi terhadap variabel kualitas SDM dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator kualitas SDM dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas SDM**

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X2.1	21 (17,5%)	38 (31,66%)	30 (25%)	24 (20%)	17 (14,16%)	120 (100%)
X2.2	27 (22,5%)	44 (36,66%)	23 (19,16%)	18 (15%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X2.3	30 (25%)	44 (36,66%)	25 (20,83%)	16 (13,33%)	5 (4,16%)	120 (100%)
X2.4	22 (18,33%)	51 (42,5%)	21 (17,5%)	22 (18,33%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X2.5	21 (17,5%)	44 (36,66%)	24 (20%)	25 (20,83%)	6 (5%)	120 (100%)
X2.6	22 (18,33%)	44 (36,66%)	21 (17,5%)	23 (19,16%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X2.7	29 (24,16%)	32 (26,66%)	20 (16,66%)	26 (21,66%)	13 (10,83%)	120 (100%)
X2.8	27 (22,5%)	43 (35,83%)	20 (16,66%)	21 (17,5%)	9 (7,5%)	120 (100%)
X2.9	16 (13,33%)	38 (31,66%)	34 (28,33%)	29 (24,16%)	3 (2,5%)	120 (100%)
Rata-rata	15,92%	34,99%	20,18%	18,88%	7,4%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kualitas SDM, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 34,99%.

c. Deskripsi variabel reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelolah pemerintahan Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Deskripsi mengenai reformasi birokrasi akan diuraikan berdasarkan jawaban responden mengenai reformasi birokrasi dalam setiap indikator yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Tanggapan Responden atas Reformasi Birokrasi**

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X3.1	21 (17,5%)	38 (31,66%)	22 (18,33%)	24 (20%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X3.2	24 (20%)	58 (48,33%)	16 (13,33%)	18 (15%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X3.3	19 (15,83%)	39 (32,5%)	23 (19,16%)	25 (20,83%)	14 (11,66%)	120 (100%)
X3.4	21 (17,5%)	30 (25%)	28 (23,33%)	30 (25%)	11 (9,16%)	120 (100%)
X3.5	30 (25%)	59 (49,16%)	12 (10%)	16 (13,33%)	3 (2,5%)	120 (100%)
X3.6	9 (7,5%)	50 (41,66%)	26 (21,66%)	22 (18,33%)	12 (10%)	120 (100%)
X3.7	14 (11,66%)	64 (53,33%)	14 (11,66%)	20 (16,66%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X3.8	29 (24,16%)	48 (40%)	18 (15%)	19 (15,83%)	6 (5%)	120 (100%)
Rata-rata	17,39%	40,2%	14,68%	18,12%	6,97%	100%

*Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020*

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai reformasi birokrasi, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 40,2%

d. Deskripsi variabel proses lelang

Disiplin kerja merupakan kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan mematuhi segala aturan dan norma-norma dalam lingkungan kerja.

Berikut disajikan deskripsi proses lelang yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel proses lelang.

**Tabel 4.7**

**Tanggapan Responden atas Variabel Proses Lelang**

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X4.1	19 (15,83%)	42 (35%)	22 (18,33%)	24 (20%)	13 (10,83%)	120 (100%)
X4.2	13 (10,83%)	35 (29,16%)	33 (27,5%)	23 (19,16%)	16 (13,33%)	120 (100%)
X4.3	29 (24,16%)	53 (44,16%)	13 (10,83%)	20 (16,66%)	5 (4,16%)	120 (100%)
Rata-rata	16,94%	36,1%	18,88%	18,6%	9,44%	100%

*Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020*

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai proses lelang, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 36,1%.

e. Deskripsi variabel penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya.

Berikut disajikan deskripsi penyerapan anggaran yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel penyerapan anggaran.

**Tabel 4.8**  
**Tanggapan Responden atas Variabel Penyerapan Anggaran**

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
Y1	16 (13,33%)	43 (35,83%)	25 (20,83%)	23 (19,16%)	13 (10,83%)	120 (100%)
Y2	17 (14,16%)	50 (41,66%)	23 (19,16%)	16 (13,33%)	14 (11,66%)	120 (100%)
Y3	24 (20%)	46 (38,33%)	16 (13,33%)	24 (20%)	10 (8,33%)	120 (100%)
Y4	21 (17,5%)	28 (23,33%)	25 (20,83%)	23 (19,16%)	23 (19,16%)	120 (100%)
Y5	21 (17,5%)	30 (25%)	28 (23,33%)	30 (25%)	11 (9,16%)	120 (100%)
Y6	30 (25%)	59 (49,16%)	12 (10%)	16 (13,33%)	3 (2,5%)	120 (100%)
Y7	9 (7,5%)	50 (41,66%)	26 (21,66%)	22 (18,33%)	13 (10,83%)	120 (100%)
Y8	14 (11,66%)	64 (53,33%)	14 (11,66%)	20 (16,66%)	8 (6,66%)	120 (100%)
Rata-rata	15,83%	38,53%	15,93%	18,12%	9,89%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai penyerapan anggaran, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 36,1%.

## 4.2 Pengujian Hipotesis

### 4.2.1 Pengujian Validasi

Pengujian validasi data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan gejala atau kejadian yang di ukur. Validasi konstruk dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *bivariate person* (*korelasi product momen person*), dimana menurut Sugiono (2016) adalah

cara yang dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan nilai total penjumlahan keseluruhan item yang diolah menggunakan program SPSS, dimana dikatakan valid apabila memiliki nilai *corrected item total correlation* melebihi atau di atas dari 0,30.

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk menyatakan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Jika angka korelasi yang diperoleh di bawah atau kurang dari 0,30 maka pernyataan tersebut tidak valid atau tidak konsisten dengan pernyataan yang lain, sedangkan apabila di atas atau melebihi dari 0,30 berarti indikator yang digunakan sudah valid.

Untuk hasil lengkap dari uji validasi atas perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Validasi**

Item-Total Statistics

Variabel	Correcte Item- Total Correlation	Nilai r Standar	Keterangan	Interpretas
X1.1	0,391	0,30	> 0,30	Valid
X1.2	0,475	0,30	> 0,30	Valid
X1.3	0,453	0,30	> 0,30	Valid
X1.4	0,415	0,30	> 0,30	Valid
X1.5	0,476	0,30	> 0,30	Valid
X1.6	0,359	0,30	> 0,30	Valid
X1.7	0,322	0,30	> 0,30	Valid
X1.8	0,359	0,30	> 0,30	Valid
X1.9	0,385	0,30	> 0,30	Valid
X2.1	0,334	0,30	> 0,30	Valid
X2.2	0,458	0,30	> 0,30	Valid
X2.3	0,420	0,30	> 0,30	Valid
X2.4	0,479	0,30	> 0,30	Valid
X2.5	0,407	0,30	> 0,30	Valid
X2.6	0,354	0,30	> 0,30	Valid
X2.7	0,514	0,30	> 0,30	Valid
X2.8	0,358	0,30	> 0,30	Valid
X2.9	0,387	0,30	> 0,30	Valid
X3.1	0,434	0,30	> 0,30	Valid
X3.2	0,463	0,30	> 0,30	Valid
X3.3	0,332	0,30	> 0,30	Valid
X3.4	0,372	0,30	> 0,30	Valid
X3.5	0,428	0,30	> 0,30	Valid
X3.6	0,482	0,30	> 0,30	Valid
X3.7	0,409	0,30	> 0,30	Valid
X3.8	0,411	0,30	> 0,30	Valid
X4.1	0,709	0,30	> 0,30	Valid
X4.2	0,489	0,30	> 0,30	Valid
X4.3	0,553	0,30	> 0,30	Valid
Y1	0,509	0,30	> 0,30	Valid
Y2	0,318	0,30	> 0,30	Valid
Y3	0,428	0,30	> 0,30	Valid
Y4	0,343	0,30	> 0,30	Valid
Y5	0,403	0,30	> 0,30	Valid
Y6	0,306	0,30	> 0,30	Valid
Y7	0,414	0,30	> 0,30	Valid
Y8	0,421	0,30	> 0,30	Valid

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari tabel uji validasi diatas, tergambaran variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang terhadap penyerapan anggaran memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dibandingkan dengan r standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator atau koesioner yang digunakan pada setiap variabel valid.

#### 4.2.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Realibilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ), dimana menurut Sugiono (2016) bahwa suatu konstruk atau indikator dikatakan realibel yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) lebih besar ( $>$ ) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah realible, sedangkan apabila nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) lebih kecil ( $<$ ) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak realible. Secara keseluruhan uji realibilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Pengujian Realibilitas**

Variabel	Cronbachs Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Realibilitas	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,702	0,778	0,60	Realiablel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	0,729	0,759	0,60	Realiablel
Reformasi Birokrasi (X3)	0,804	0,605	0,60	Realiablel
Proses Lelang (X4)	0,741	0,669	0,60	Realiablel
Penyerapan Anggaran (Y)	0,767	0,797	0,60	Realiablel

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Nilai cronbach's alpha semua variabel yang ditunjukkan tabel diatas, yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang dan penyerapan anggaran lebih besar dari nilai standar realibilitas yaitu lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau koesioner semua variabel handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur.

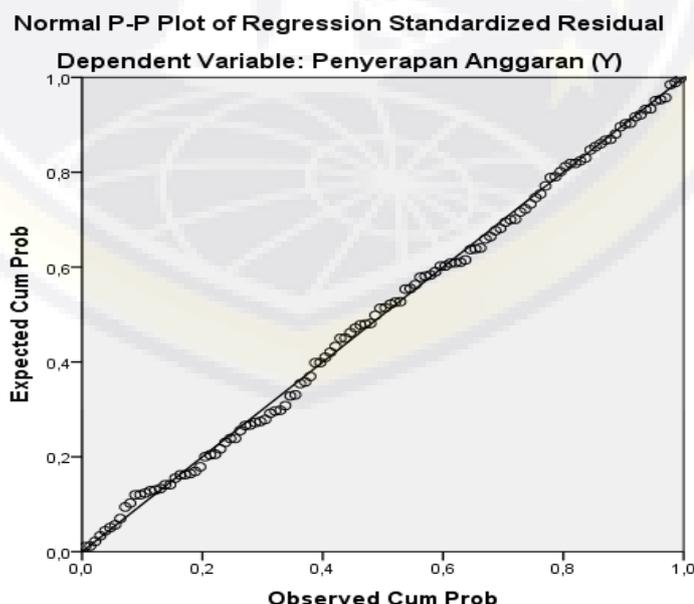
#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik *P-P plot*. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan grafik *P-P Plot* menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26:

**Gambar 4.1**  
**Grafik P-P Plot**



Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik *P-P plot*, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF <10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,128	1,787		3,996	,000		
	Perencanaan Anggaran (X1)	,043	,092	,043	2,469	,040	,941	1,063
	Kualitas SDM (X2)	,092	,087	,096	2,061	,001	,977	1,024
	Reformasi Birokrasi (X3)	,239	,103	,214	2,317	,022	,942	1,061
	Proses Lelang (X4)	,150	,142	,099	4,057	,000	,909	1,100

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Melihat hasil pada tabel 4.9, hasil perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen Perencanaan Anggaran bernilai sebesar 0.941, Kualitas SDM sebesar 0.977, Reformasi Birokrasi sebesar 0.942 dan Proses Lelang sebesar 0,909. Sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance*

*Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen Perencanaan Anggaran bernilai sebesar 1.063, Kualitas SDM sebesar 1.024, Reformasi Birokrasi sebesar 1.061 dan Proses Lelang sebesar 1.100. Merujuk hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

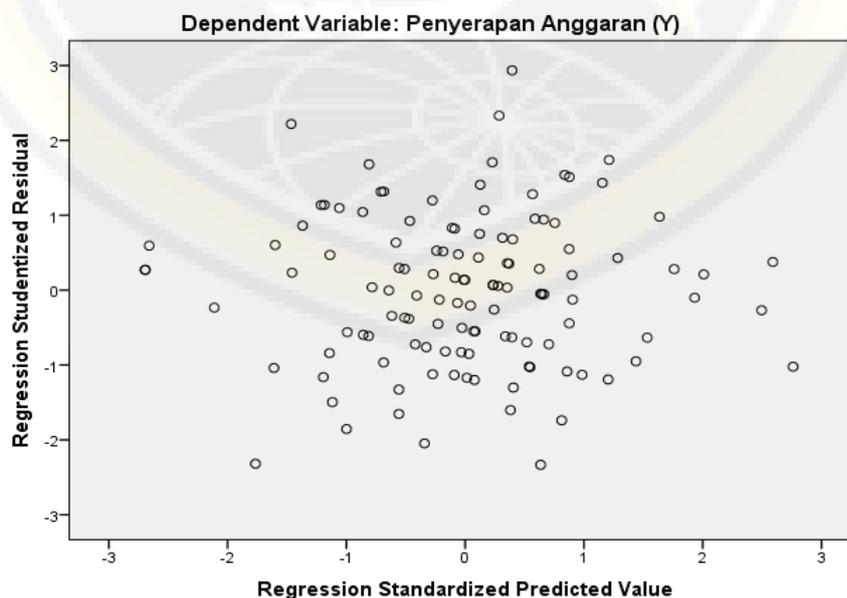
### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y.

### Gambar 4.2

#### Scatterplot

#### Scatterplot



Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,779 <sup>a</sup>	,606	,046	3,109	2,016

a. Predictors: (Constant), Proses Lelang (X4), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3), Perencanaan Anggaran (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2.016, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 120 ( $n$ ), dan jumlah variabel independen 4 ( $k=4$ ), maka di tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai  $du$  sebesar 1.77. Karena nilai DW 2.016 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) 1.77 dan kurang dari  $4 - 1.63$  (2.37), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran pada

kabupaten Majene, dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan berdasarkan nilai dari standardized coefficients hasil regresi antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran.

Untuk lebih jelas akan disajikan hasil olahan data dengan menggunakan program *statistical package for the social sciences* (SPSS) antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Olahan Data Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.128	1.787		3.996	.000
	Perencanaan Anggaran (X1)	.043	.092	.043	2.469	.030
	Kualitas SDM (X2)	.092	.087	.096	2.061	.001
	Reformasi Birokrasi (X3)	.239	.103	.214	2.317	.022
	Proses Lelang (X4)	.150	.142	.099	4.057	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari hasil olahan diatas, maka dimasukkan data pada rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

$$Y = 2.128 + 0.043x_1 + 0.092x_2 + 0.239x_3 + 0.150x_4$$

4.1 Konstanta ( $a$ ) sebesar 2,128 artinya jika semua variabel bebas yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang memiliki nilai 0, maka kualitas audit ( $Y$ ) memiliki nilai sebesar 2,128.

4.2 Koefisien regresi ( $b_1$ ) untuk variabel perencanaan anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,043; artinya jika perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,043. Koefisien bernilai positif antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran.

4.3 Koefisien regresi ( $b_2$ ) untuk variabel kualitas SDM ( $X_2$ ) sebesar 0,092; artinya jika kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran ( $Y$ ) akan naik sebesar 0,092. Koefisien bernilai positif antara kualitas SDM dan penyerapan anggaran.

4.4 Koefisien regresi ( $b_3$ ) untuk variabel reformasi birokrasi ( $X_3$ ) sebesar 0,239, artinya jika reformasi birokrasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran ( $Y$ ) akan naik sebesar 0,239. Koefisien bernilai positif antara reformasi birokrasi dan penyerapan anggaran.

4.5 Koefisien regresi ( $b_4$ ) untuk variabel proses lelang ( $X_4$ ) sebesar 0,150, artinya jika proses lelang mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran ( $Y$ ) akan naik sebesar 0,150. Koefisien bernilai positif antara proses lelang dan penyerapan anggaran.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara perencanaan *anggaran*, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran pada kabupaten Majene dapat dilihat dari tabel berikut:

**Table 4.11**  
**Nilai Koefisien Determenasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 <sup>a</sup>	.606	.046	3.109

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, Proses Lelang

b. Dependent Variable: Penyerapan anggaran

*Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26*

Berdasarkan hasil analisis kolerasi yang dikutip pada table diatas, maka dapat dikatakan bahwa kolerasi atau hubungan antara variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap penyerapan anggaran, karena diperoleh nilai koefisien kolerasi ( $r$ ) sebesar 0,606.

Dari tabel koefisien determinasi di atas, diketahui Adjusted R square adalah 0,606 atau 60,6%. Hal ini berarti sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran kabupaten Majene adalah 60,6% sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **4.3 Hasil Pengujian Hipotesis**

Pembuktian hipotesis yang di sajikan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial ( $t$ ) dan uji simultan ( $F$ ) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (t)

Analisis uji parsial (t) dilakukan untuk membuktikan pengaruh signifikan antara variabel independen (perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran).

Dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung ( $t_{hitung}$ ) dan t tabel ( $t_{tabel}$ ).

Penunjukan diterimahnya hipotesis jika t hitung lebih besar dari t table ( $t_{hitung} >$

$t_{table}$ ), t table ( $t_{table}$ ) diperoleh dari banyaknya observasi dikurang banyaknya

variable yang digunakan ( $n - k - 1$ ), yaitu  $120 - 5 - 1 = 114$ , maka diketahui t

table adalah 1.65833 (1,658). Dimana derajat signifikan yang digunakan adalah

lebih kecil  $\alpha = 0,05$ , artinya nilai signifikan harus lebih kecil dari derajat

kepercayaan ( $\alpha$ ) atau probabilitas. Untuk hasil yang dikelola, disajikan pada tabel

berikut:

**Tabel 4.12**  
**Uji t coefficient**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig,	Keterangan
	B	Std, Error	Beta				
1 (Constant)	2.128	1.787		3.996		.	
Perencanaan Anggaran	.043	.092	.043	2.469	1,658	.030	Hipotesa diterima
Kualitas SDM	.092	.087	.096	2.061	1,658	.001	Hipotesa diterima
Reformasi Birokrasi	.239	.103	.214	2.317	1,658	.022	Hipotesa diterima
Proses Lelang	.150	.142	.099	4.057	1,658	.000	Hipotesa diterima

a. *Dependent Variable: Penyerapan Anggaran*

*Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ( $\text{sig}, < \alpha$ ) =  $0,030 < 0,05$  maka hipotesis 1 diterima. Dimana  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ) =  $2,469 > 1,658$ . Terlihat bahwa variabel  $X_1$  memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel  $X_1$  mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2. Kualitas SDM ( $X_2$ )

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ( $\text{sig}, < \alpha$ ) =  $0,001 < 0,05$  maka hipotesis 2 diterima. Dimana  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ) =  $2,061 > 1,658$ . Terlihat bahwa variabel  $X_2$  memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel  $X_2$  mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

3. Reformasi Birokrasi ( $X_3$ )

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ( $\text{sig}, < \alpha$ ) =  $0,022 < 0,05$  maka hipotesis 3 diterima. Dimana  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ) =  $2,317 > 1,658$ , Terlihat bahwa variabel  $X_3$  memiliki kontribusi terhadap

Y, Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel  $X_3$  mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

#### 4. Proses Lelang ( $X_4$ )

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ( $\text{sig}, < \alpha$ ) =  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis 4 diterima. Dimana  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ) =  $4,057 > 1,658$ , Terlihat bahwa variabel  $X_3$  memiliki kontribusi terhadap Y, Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel  $X_3$  mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

#### b. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari perencanaan anggaran ( $X_1$ ), kualitas SDM ( $X_2$ ), reformasi birokrasi ( $X_3$ ) dan proses lelang ( $X_4$ ) sedangkan variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak, maka  $F_{\text{hitung}}$  harus lebih besar dari F tabel ( $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ) melalui  $\text{sig}, \alpha = 0,05$ . Untuk mengetahui nilai F tabel ( $F_{\text{tabel}}$ ) dilakukan dengan melihat tabel titik persentase distribusi F dengan probabilitas 0,05 dimana  $df_1$  adalah  $k - 1$  ( $5 - 1$ ) = 4 dan  $df_2$  adalah  $n - k$  ( $120 - 5$ ) = 116 sehingga diperoleh F tabel ( $F_{\text{tabel}}$ ) = 2,45.

Hasil uji F antara perencanaan anggaran ( $X_1$ ), kualitas SDM ( $X_2$ ), reformasi birokrasi ( $X_3$ ) dan proses lelang ( $X_4$ ) terhadap penyerapan anggaran (Y)

dapat dilihat tabel anova hasil perhitungan dari SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93.691	4	.423	32.423	.002 <sup>b</sup>
	Residual	1111.476	115	9.665		
	Total	1205.167	119			

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran , Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, Proses Lelang

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Untuk membuktikan Hipotesis penelitian yang telah diketahui sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 32,423 dengan F tabel ditentukan sebesar 2,45. Maka dapat lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) = 32,423 > 2,45. Dengan demikian hipotesis 6 penelitian diterima, artinya variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran kabupaten Majene.

Sementara itu berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai probabilitas (Sig.) yang dihasilkan sebesar 0,002, Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan anggaran, atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, diterima.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang terhadap peningkatan penyerapan anggaran pada kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menerawang hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, melihat hubungan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, hubungan kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran, hubungan reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran, hubungan proses lelang terhadap penyerapan anggaran dan hubungan keempat variabel independen yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran

Penelitian ini mengambil sampel sebagai responden sebanyak 120 orang untuk menjadi alat ukur dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan karakteristik tingkatan umur diketahui jumlah responden yang memiliki tingkatan umur antara 31 sampai 45 tahun sebanyak 62 orang dengan persentase 52%. Usia yang dianggap produktif karena mampu menyerap dan menerima hal yang baru serta memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya pada karakteristik tingkat pendidikan, pada tingkat strata satu (S1) memiliki angka yang lebih banyak yaitu 98 orang dengan persentase 82%. Tingkat pendidikan yang tinggi dianggap lebih produktif dalam melaksanakan dan memahami pekerjaannya. Karakteristik pada jenis kelamin jumlah laki-laki jauh lebih banyak yaitu sebesar 96 orang dengan

persentase 80%. Umumnya laki-laki lebih produktif dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan faktor fisik laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan, terutama bidang pekerjaan yang lebih menguras tenaga.

Pada analisis masalah selanjutnya dalam penelitian ini, mencoba mengetahui seberapa besar variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang berpengaruh pada variabel penyerapan anggaran pada kabupaten Majene. Untuk menguji penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, uji F atau uji simultan dan uji t atau uji parsial. Secara umum hasil penelitian ini memuaskan. Segala hipotesis yang digambarkan diterima berdasarkan analisis hasil jawaban responden pada kabupaten Majene yang terkelola.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, Proses Lelang terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Majene Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, proses lelang secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusi, reformasi birokrasi, proses lelang merupakan faktor-faktor yang sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene

#### **5.2 Saran Penelitian**

Dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk :

1. Melakukan metode wawancara secara langsung dan mendalam kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

2. Menambah dan mempertimbangkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD seperti variabel waktu penetapan anggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Majene. dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dalam hal kualitas kerja dan disiplin kerja serta motivasi terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan serta memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan metode observasi lapangan untuk dapat mengamati langsung sehingga dapat lebih yakin dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akadira, Tora, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Amran, 2009. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departmen Sosial Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol.4. No.2, Gorontalo
- Arif, Emkhad. 2012. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 19 No. 2 Desember 2012.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. *Majalah Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, Edisi Desember 2011 tahun III/No 6 ISSN 2088-2890*.
- Bakara, Bakerlin S., 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Dewi, Aninda Yusmiati, Meirinawati. 2012. *Analisis Reformasi Birokrasi (Studi Deskriptif Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I*
- Erlina.2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan:Usu Press.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*.Tesis. Jakarta: FEUI.
- Kuncoro, Egiastyo Dwi. 2013. *Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Prov. Kaltim*. *eJournal Administrasi Bisnis, 2013, 1 (4) ISSN 0000-0000* [ejournal.adbisnis.fsip-unmul.ac.id](http://ejournal.adbisnis.fsip-unmul.ac.id)
- Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun*

*Anggaran. Tesis.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.

Malahayati, Cut; Islahuddin; Hasan Basri.2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, Volume 4, No. 1, februari 2015, ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9 Pages pp. 11- 19.*

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi, Yogyakarta. Maulana, D. (2011). *Analisis Penelusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia.* Simposium Nasional Otonomi Daerah2011.Banten: Universitas Serang Raya.

Miliasih, Retno.2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis.* Jakarta.Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.

Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda, 2011, *Absortive Capacity Constrain*

Monica, Andrea and Gabriela Monica, 2013. The role of the Government in the absorption of The European Funds in Romania, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.2, Issue 4

Notoadmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Noviwijaya, A.,dan Rohman, A. (2013). *Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN SemarangI).* Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.

Nugroho, M.A., dan Ananda, C.F. (2013).*Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akir Tahun Di KPPN Malang.* Jurnal. FE dan Bisnis Universitas Brawijaya.(online) (<http://JIM.FEB.UB.ac.id>). Diakses 17Mei 2015.

Putri, C.T. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu.* Skripsi.Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Rifai, Ahmad, Biana Adha Inapty, Rr. Sri Pancawati M. 2016. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB).* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 11, No. 1, Januari 2016.

- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah.2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, Volume 4, No. 4, November 2015, ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages pp. 101- 110.*
- Said, Mas'ud, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press.
- Sedarmayanti.2009.*Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung: PT Refika Aditama
- Seftianova, R.dan Helmy,A. (2013). *Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang.*JRAK. Vol.4,No. 1,Hlm 75-84.
- Sinaga, Edward James, 2016. *Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Jurnal Rechts Vinding Volume 5 Nomor. 2, Agustus 2016*
- Siswanto D.A dan Rahayu L.S. 2011. *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.*
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suhipna, D. dan Winarti, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyerapan Anggaran Di Wilayah Kerja Kppn Sragen. Jurnal Ekonomi Volume XXV No. 2.Hal 15-34*
- Supriana, Tavi, 2016. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, USU Press, Medan.
- Toni. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran Pada KPPN Bandung.*
- Tunggal, T. B. (2011). *Problem Klasik Penyerapan Anggaran Harus diatasi.* Media Keuangan. Volume VI.
- UNDP. (2008). *Capacity Development Practice Note.*
- Utomo, Kurniawan Cahyo, 2014. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Reformasi Birokrasi, dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi dan Penyerapan Anggaran. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 14, No. 1, April 2014*
- Yuhertiana. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1.* BPFE UGM, Yogyakarta.
- Yunarto, I. (2011). *Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran.* Yokyakarta:ParisReview.

Yustini, Santi, 2014. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 2, Agustus 2014*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

**BOSOWA**



### 1. Penyerapan Anggaran (Y)

Daftar pertanyaan berikut ini di gunakan untuk menjelaskan kualitas informasi penyerapan anggaran pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Bapak/Ibu

No	Pertanyaan	Pilihan				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
I	<b>Indikator : Relevan</b>					
1	Anggaran yang direalisasikan di instansi saya mampu mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan					
2	Dalam pengevaluasian keberhasilan penyerapan anggaran di instansi saya selalu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya					
3	Realisasi anggaran di instansi saya setiap triwulan mampu mencapai target proporsional yaitu sebesar 25%					
4	Capaian realisasi fisik dan keuangan di instansi saya setiap triwulan menunjukkan peningkatannya yang seimbang					
5	Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA di instansi saya dilaksanakan sesuai jadwal					
6	Di instansi saya selalu membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya					
7	Dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan instansi saya telah ditunjukkan jumlah pagu anggaran, anggaran yang telah terealisasi dan perbandingan antara pagu anggaran dan sisa anggaran					
8	Di SKPD saya realisasi untuk penyerapan anggaran belanja langsung (program dan kegiatan) tidak pernah mencapai 90%					

**Perencanaan Anggaran (Xi)**

No	Pertanyaan	Pilihan				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
<b>I</b>	<b>Indikator : Relevan</b>					
1	Perencanaan anggaran di instansi saya melibatkan aspirasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan daerah					
2	Sebagian kegiatan/belanja langsung dalam RKAS KPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang yang tercantum dalam KUA-PPAS					
3	Proses penyusunan perencanaan anggaran di instansi saya berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat					
4	Program/kegiatan yang disusun oleh instansi saya sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
5	Pembahasan perencanaan anggaran antara eksekutif dan legislatif terlalu lama					
6	Dalam penyusunan perencanaan anggaran di instansi saya menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja					
7	Dalam penyusunan perencanaan anggaran instansi saya menggunakan instrumen seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal					
8	Perencanaan anggaran yang disusun di instansi saya sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan tupoksi SKPD					
9	Output program/kegiatan yang direncanakan di instansi saya mendukung pencapaian sasaran Renja/Renstra					

### Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)

No	Pertanyaan	Pilihan				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
<b>I</b>	<b>Indikator : Relevan</b>					
<b>1</b>	Pengalaman yang saya miliki memudahkan saya dalam melakukan tugas					
<b>2</b>	Keahlian saya dalam mengelola anggaran tercermin dari banyaknya pengalaman/lamanyamenjabat					
<b>3</b>	Pada SKPD tempat saya bertugas , pengelola keuangan memenuhi syarat pendidikan tertentu, misalnya D-III atau S-1Jabatan saya sekarang sesuai dengan latarbelakang pendidikan saya					
<b>4</b>	Sebagai pengelola keuangan saya sering mengikuti pelatihan dan bimbingan teknitentang pengelolaan keuangan					
<b>5</b>	Penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa di instansi saya sesuai sertifikat yang dimiliki					
<b>6</b>	Dalam melaksanakan tugas, saya berpedoman pada buku panduan dan peraturan yang berlaku					
<b>7</b>	Dengan memahami buku panduan dan peraturan membantu saya meminimalisir kesalahan yang saya buat					
<b>8</b>	Pejabat/pegawai di satuan kerja sering mengalami mutasi/ pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan					
<b>9</b>	Pegawai yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD terbatas					

### Repormasi Birokrasi (X3)

No	Pertanyaan	Pilihan				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
<b>I</b>	<b>Indikator ; Relevan</b>					
1	Prinsip kesederhanaan dalam reformasi birokrasi menghasilkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan					
2	Dengan adanya reformasi birokrasi membuat kejelasan dalam persyaratan teknis dan administrasi					
3	Reformasi birokrasi menghasilkan kepastian waktu sehingga dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan					
4	Tidak ada keputusan mengambil tindakan sehingga atasan menyetujui keputusan					
5	Mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan terus menerus diutamakan					
6	Karyawan harus bertanya kepada atasan sebelum mereka mengerjakan sesuatu					
7	Karyawan harus bertanya kepada atasan sebelum mereka mengerjakan sesuatu					
8	Keputusan apapun yang dibuat karyawan harus mendapat persetujuan oleh atasan					

### Proses Lelang (X4)

No	Pertanyaan	Pilihan				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
<b>I</b>	<b>Indikator : Relevan</b>					
1	Proses lelang yang di laksanakan sesuai dengan jadwal yang di tentukan					
2	Pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki sertifikat					
3	Surat keputusan panitia lelang telah di tetapkan dan memenuhi spesifikasi yang ada					
4	Kualitas dalam perumusan harga perkiraan sendiri					

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:19:00	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120

Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.03

### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Perencanaan Anggaran (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	-.099	-.089	.059	-.116	-.164	-.008	.193*	.035	.391**
	Sig. (2-tailed)		.283	.331	.519	.209	.074	.934	.035	.706	.001
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.2	Pearson Correlation	-.099	1	-.150	.020	.064	-.069	-.166	-.178	.033	.475
	Sig. (2-tailed)	.283		.102	.827	.488	.454	.071	.051	.719	.016
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.3	Pearson Correlation	-.089	-.150	1	-.138	-.096	.080	-.177	.006	.007	.453**
	Sig. (2-tailed)	.331	.102		.132	.299	.384	.053	.952	.939	.005
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.4	Pearson Correlation	.059	.020	-.138	1	-.049	-.027	.105	.117	.043	.415**
	Sig. (2-tailed)	.519	.827	.132		.595	.773	.255	.202	.644	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.5	Pearson Correlation	-.116	.064	-.096	-.049	1	-.157	.032	-.082	-.030	.476
	Sig. (2-tailed)	.209	.488	.299	.595		.086	.730	.373	.745	.004
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.6	Pearson Correlation	-.164	-.069	.080	-.027	-.157	1	.058	.000	.048	.359**
	Sig. (2-tailed)	.074	.454	.384	.773	.086		.528	.998	.604	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.7	Pearson Correlation	-.008	-.166	-.177	.105	.032	.058	1	-.006	-.028	.322**

	Sig. (2-tailed)	.934	.071	.053	.255	.730	.528		.946	.764	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.8	Pearson Correlation	.193*	-.178	.006	.117	-.082	.000	-.006	1	-.028	.359**
	Sig. (2-tailed)	.035	.051	.952	.202	.373	.998	.946		.764	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X1.9	Pearson Correlation	.035	.033	.007	.043	-.030	.048	-.028	-.028	1	.385**
	Sig. (2-tailed)	.706	.719	.939	.644	.745	.604	.764	.764		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Perencanaan Anggaran (X1)	Pearson Correlation	.391**	.475	.453**	.415**	.476	.359**	.322**	.359**	.385**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.016	.005	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

### Notes

Output Created		28-FEB-2020 23:19:29
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.01

**Scale: ALL VARIABLES**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.702	9

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	26.72	9.499	.088	.254 <sup>a</sup>
X1.2	26.35	10.717	.211	.158 <sup>a</sup>
X1.3	26.65	10.028	.196	.112 <sup>a</sup>
X1.4	26.76	8.538	.035	.404 <sup>a</sup>
X1.5	26.59	10.311	.179	.161 <sup>a</sup>
X1.6	26.73	9.025	.077	.269 <sup>a</sup>
X1.7	26.65	9.271	.069	.276 <sup>a</sup>
X1.8	26.38	8.976	.029	.375 <sup>a</sup>
X1.9	26.65	8.784	.035	.390 <sup>a</sup>

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:20:07	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Kualitas SDM
X2.1	Pearson Correlation	1	-.302**	.018	-.055	.113	-.169	.340**	-.169	.162	.334**
	Sig. (2-tailed)		.001	.849	.550	.220	.066	.000	.065	.077	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.2	Pearson Correlation	-.302**	1	.047	-.144	-.118	-.001	-.033	.032	-.066	.458
	Sig. (2-tailed)	.001		.612	.118	.200	.993	.720	.732	.472	.005
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.3	Pearson Correlation	.018	.047	1	-.097	.027	.088	.074	-.008	.069	.420**
	Sig. (2-tailed)	.849	.612		.293	.769	.342	.419	.932	.453	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.4	Pearson Correlation	-.055	-.144	-.097	1	-.185*	-.091	-.110	.056	-.063	.479
	Sig. (2-tailed)	.550	.118	.293		.043	.321	.232	.540	.494	.031

	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.5	Pearson Correlation	.113	-.118	.027	-.185*	1	-.163	.041	-.046	-.083	.407*
	Sig. (2-tailed)	.220	.200	.769	.043		.075	.658	.616	.365	.024
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.6	Pearson Correlation	-.169	-.001	.088	-.091	-.163	1	-.008	.177	.140	.354**
	Sig. (2-tailed)	.066	.993	.342	.321	.075		.932	.054	.128	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.7	Pearson Correlation	.340**	-.033	.074	-.110	.041	-.008	1	-.035	.046	.514**
	Sig. (2-tailed)	.000	.720	.419	.232	.658	.932		.708	.619	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.8	Pearson Correlation	-.169	.032	-.008	.056	-.046	.177	-.035	1	-.014	.358**
	Sig. (2-tailed)	.065	.732	.932	.540	.616	.054	.708		.877	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X2.9	Pearson Correlation	.162	-.066	.069	-.063	-.083	.140	.046	-.014	1	.387**
	Sig. (2-tailed)	.077	.472	.453	.494	.365	.128	.619	.877		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Kualitas SDM	Pearson Correlation	.334**	.458	.420**	.479	.407*	.354**	.514**	.358**	.387**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.031	.024	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:20:29	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.01

**Scale: ALL VARIABLES**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.729	9

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	27.76	9.781	.016	.134 <sup>a</sup>
X2.2	27.57	11.171	.199	.032
X2.3	27.46	9.141	.090	.234 <sup>a</sup>
X2.4	27.53	11.596	.238	.047
X2.5	27.70	10.750	.141	.021 <sup>a</sup>
X2.6	27.70	9.624	.012	.139 <sup>a</sup>
X2.7	27.79	8.234	.126	.310 <sup>a</sup>
X2.8	27.57	9.592	.002	.149 <sup>a</sup>
X2.9	27.78	9.415	.077	.213 <sup>a</sup>

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:20:50	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

**Correlations**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Reformasi Birokrasi
X3.1	Pearson Correlation	1	-.160	-.236**	.029	.025	-.047	-.024	-.124	.434*
	Sig. (2-tailed)		.080	.009	.749	.788	.610	.793	.176	.010
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.2	Pearson Correlation	-.160	1	-.199*	.017	.003	.122	.048	-.061	.463**
	Sig. (2-tailed)	.080		.029	.855	.978	.186	.606	.506	.004
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.3	Pearson Correlation	-.236**	-.199*	1	-.037	-.034	-.087	.077	.251**	.332**
	Sig. (2-tailed)	.009	.029		.686	.709	.347	.405	.006	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.4	Pearson Correlation	.029	.017	-.037	1	-.053	-.208*	.114	-.026	.372**
	Sig. (2-tailed)	.749	.855	.686		.565	.023	.216	.777	.000

	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.5	Pearson Correlation	.025	.003	-.034	-.053	1	-.177	-.017	-.081	.428*
	Sig. (2-tailed)	.788	.978	.709	.565		.053	.858	.379	.012
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.6	Pearson Correlation	-.047	.122	-.087	-.208*	-.177	1	-.161	.028	.482*
	Sig. (2-tailed)	.610	.186	.347	.023	.053		.079	.758	.047
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.7	Pearson Correlation	-.024	.048	.077	.114	-.017	-.161	1	.000	.409**
	Sig. (2-tailed)	.793	.606	.405	.216	.858	.079		1.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.8	Pearson Correlation	-.124	-.061	.251**	-.026	-.081	.028	.000	1	.411**
	Sig. (2-tailed)	.176	.506	.006	.777	.379	.758	1.000		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Reformasi Birokrasi	Pearson Correlation	.434*	.463**	.332**	.372**	.428*	.482*	.409**	.411**	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.004	.000	.000	.012	.047	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

### Notes

Output Created		28-FEB-2020 23:21:15
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.01

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.804	8

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	24.10	8.040	.223	.177 <sup>a</sup>
X3.2	23.65	7.624	.114	.335 <sup>a</sup>
X3.3	24.12	7.297	.120	.326 <sup>a</sup>
X3.4	24.15	7.003	.071	.398 <sup>a</sup>
X3.5	23.51	7.815	.140	.306 <sup>a</sup>
X3.6	24.15	8.213	.220	.201 <sup>a</sup>
X3.7	23.85	6.734	.022	.517 <sup>a</sup>
X3.8	23.69	6.719	.003	.500 <sup>a</sup>

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:21:42	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
	Missing Value Handling	Definition of Missing
Cases Used		Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

### Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	Proses Lelang (X4)
X4.1	Pearson Correlation	1	.019	.193*	.709**
	Sig. (2-tailed)		.833	.035	.000
	N	120	120	120	120
X4.2	Pearson Correlation	.019	1	-.177	.489**
	Sig. (2-tailed)	.833		.053	.000
	N	120	120	120	120
X4.3	Pearson Correlation	.193*	-.177	1	.553**
	Sig. (2-tailed)	.035	.053		.000
	N	120	120	120	120
Proses Lelang (X4)	Pearson Correlation	.709**	.489**	.553**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120

- \*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
- \*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```
RELIABILITY
/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
```

## Reliability

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:22:09	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120

	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.01

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	3

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	6.73	2.268	.162	.430 <sup>a</sup>
X4.2	6.93	3.414	.096	.322
X4.3	6.30	3.086	.016	.038

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

## Correlations

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:22:32	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Penyerapan Anggaran (Y)
Y1	Pearson Correlation	1	-.049	.034	.104	.076	.173	-.002	.005	.509**
	Sig. (2-tailed)		.594	.711	.259	.411	.060	.983	.953	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y2	Pearson Correlation	-.049	1	-.208*	.023	.124	.071	-.208*	.083	.318**
	Sig. (2-tailed)	.594		.022	.801	.178	.442	.022	.367	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y3	Pearson Correlation	.034	-.208*	1	-.343**	-.105	-.087	.233*	.107	.428*
	Sig. (2-tailed)	.711	.022		.000	.256	.345	.010	.243	.012
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y4	Pearson Correlation	.104	.023	-.343**	1	.068	.025	-.144	.036	.343**
	Sig. (2-tailed)	.259	.801	.000		.463	.790	.116	.697	.000

	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y5	Pearson Correlation	.076	.124	-.105	.068	1	-.053	-.208*	.114	.403**
	Sig. (2-tailed)	.411	.178	.256	.463		.565	.023	.216	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y6	Pearson Correlation	.173	.071	-.087	.025	-.053	1	-.177	-.017	.306**
	Sig. (2-tailed)	.060	.442	.345	.790	.565		.053	.858	.001
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y7	Pearson Correlation	-.002	-.208*	.233*	-.144	-.208*	-.177	1	-.161	.414
	Sig. (2-tailed)	.983	.022	.010	.116	.023	.053		.079	.017
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Y8	Pearson Correlation	.005	.083	.107	.036	.114	-.017	-.161	1	.421**
	Sig. (2-tailed)	.953	.367	.243	.697	.216	.858	.079		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Penyerapan Anggaran (Y)	Pearson Correlation	.509**	.318**	.428*	.343**	.403**	.306**	.414	.421**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.012	.000	.000	.001	.017	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

## Reliability

### Notes

Output Created		28-FEB-2020 23:22:58
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.01

**Scale: ALL VARIABLES**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.767	8

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	23.37	7.663	.146	.375 <sup>a</sup>
Y2	23.25	9.147	.068	.124 <sup>a</sup>
Y3	23.17	9.871	.166	.021 <sup>a</sup>
Y4	23.58	9.020	.096	.088 <sup>a</sup>
Y5	23.42	8.480	.013	.216 <sup>a</sup>
Y6	22.78	9.184	.022	.170 <sup>a</sup>
Y7	23.42	10.615	.241	.036
Y8	23.12	8.390	.080	.277 <sup>a</sup>

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```
GET  
FILE='C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav'.  
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.  
REGRESSION  
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA  
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
/NOORIGIN  
/DEPENDENT Y  
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4.
```

## Regression

### Notes

Output Created	28-FEB-2020 23:25:00	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>

	N of Rows in Working Data File	120
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		<pre> REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4. </pre>
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02
	Memory Required	5552 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

[DataSet1] C:\Users\Lanyala Soewarno\Desktop\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Proses Lelang (X4), Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, Perencanaan Anggaran (X1) <sup>b</sup>		. Enter

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. All requested variables entered.

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.128	1.787		3.996	.000
	Perencanaan Anggaran (X1)	.043	.092	.043	2.469	.040
	Kualitas SDM	.092	.087	.096	2.061	.001
	Reformasi Birokrasi	.239	.103	.214	2.317	.022
	Proses Lelang (X4)	.150	.142	.099	4.057	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

## Regression

### Notes

Output Created		08-MAR-2020 01:33:55
Comments		
Input	Data	C:\Users\Windows 7\Documents\kerjaan dedy\Aco Firman\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	120
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax

```
REGRESSION  
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR  
  SIG N  
  /MISSING LISTWISE  
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA  
  COLLIN TOL  
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Y  
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4  
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)  
  /RESIDUALS DURBIN  
HISTOGRAM(ZRESID)  
NORMPROB(ZRESID).
```

Resources

Processor Time	00:00:01,01
Elapsed Time	00:00:01,11
Memory Required	3044 bytes
Additional Memory Required for Residual Plots	888 bytes

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyerapan Anggaran (Y)	26,58	3,182	120
Perencanaan Anggaran (X1)	29,93	3,209	120
Kualitas SDM (X2)	31,11	3,317	120
Reformasi Birokrasi (X3)	27,32	2,843	120
Proses Lelang (X4)	9,98	2,108	120

### Correlations

		Penyerapan Anggaran (Y)	Perencanaan Anggaran (X1)	Kualitas SDM (X2)	Reformasi Birokrasi (X3)	Proses Lelang (X4)
Pearson Correlation	Penyerapan Anggaran (Y)	1,000	,051	-,113	,239	-,138
	Perencanaan Anggaran (X1)	,051	1,000	-,011	-,070	-,214
	Kualitas SDM (X2)	-,113	-,011	1,000	-,111	-,077
	Reformasi Birokrasi (X3)	,239	-,070	-,111	1,000	-,173
	Proses Lelang (X4)	-,138	-,214	-,077	-,173	1,000
Sig. (1-tailed)	Penyerapan Anggaran (Y)	.	,291	,110	,004	,066
	Perencanaan Anggaran (X1)	,291	.	,452	,225	,009
	Kualitas SDM (X2)	,110	,452	.	,115	,203
	Reformasi Birokrasi (X3)	,004	,225	,115	.	,030
	Proses Lelang (X4)	,066	,009	,203	,030	.

N	Penyerapan Anggaran (Y)	120	120	120	120	120
	Perencanaan Anggaran (X1)	120	120	120	120	120
	Kualitas SDM (X2)	120	120	120	120	120
	Reformasi Birokrasi (X3)	120	120	120	120	120
	Proses Lelang (X4)	120	120	120	120	120

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Proses Lelang (X4), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3), Perencanaan Anggaran (X1) <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,779 <sup>a</sup>	,606	,046	3,109	2,016

a. Predictors: (Constant), Proses Lelang (X4), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3),

Perencanaan Anggaran (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93,691	4	23,423	32,423	,032 <sup>b</sup>
	Residual	1111,476	115	9,665		
	Total	1205,167	119			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. Predictors: (Constant), Proses Lelang (X4), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3), Perencanaan Anggaran (X1)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,128	1,787		3,996	,000		

Perencanaan Anggaran (X1)	,043	,092	,043	2,469	,040	,941	1,063
Kualitas SDM (X2)	,092	,087	,096	2,061	,001	,977	1,024
Reformasi Birokrasi (X3)	,239	,103	,214	2,317	,022	,942	1,061
Proses Lelang (X4)	,150	,142	,099	4,057	,000	,909	1,100

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

#### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	Perencanaan Anggaran (X1)	Kualitas SDM (X2)	Reformasi Birokrasi (X3)	Proses Lelang (X4)
1	1	4,935	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,040	11,084	,00	,02	,01	,02	,76
	3	,012	20,150	,00	,06	,29	,50	,00
	4	,011	21,040	,00	,55	,37	,04	,01
	5	,002	51,172	1,00	,37	,33	,44	,23

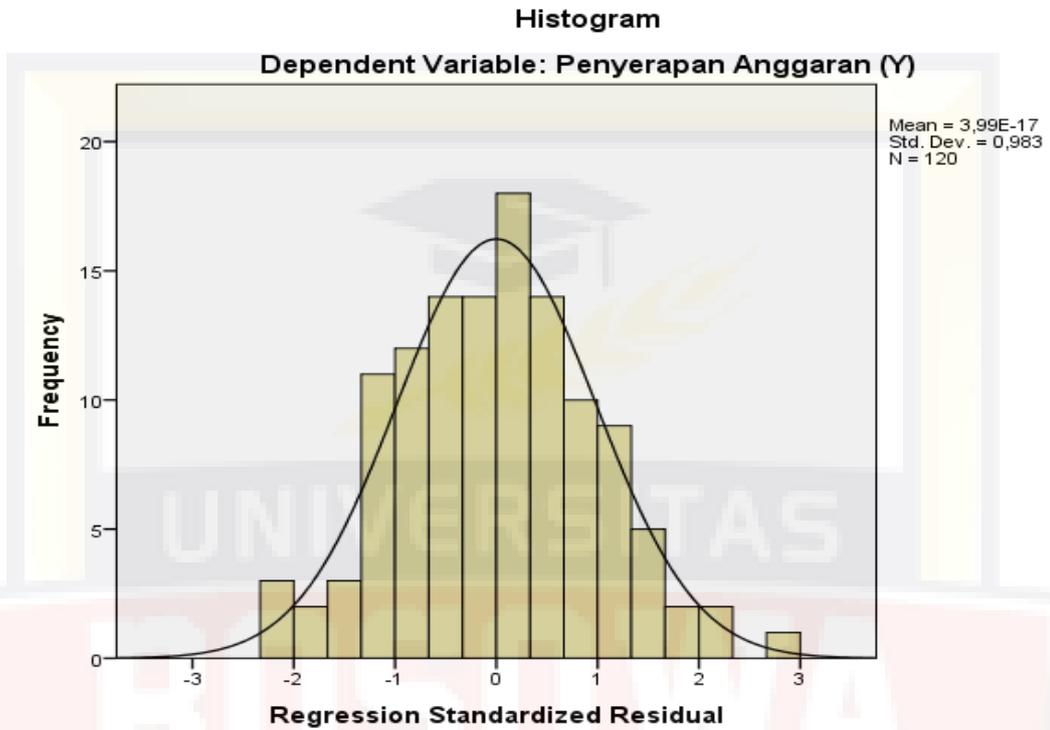
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Residuals Statistics<sup>a</sup>

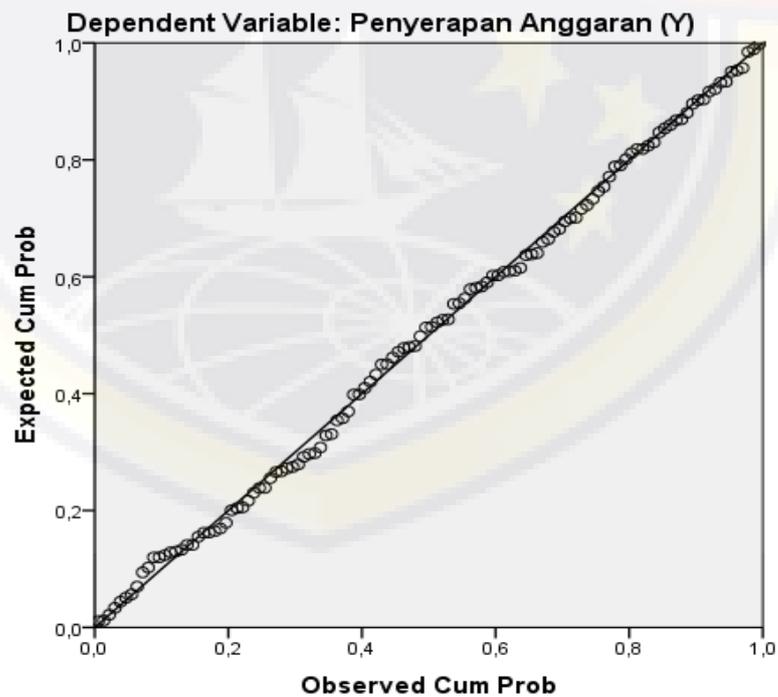
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24,19	29,03	26,58	,887	120
Std. Predicted Value	-2,696	2,761	,000	1,000	120
Standard Error of Predicted Value	,301	1,045	,616	,154	120
Adjusted Predicted Value	24,08	29,33	26,59	,904	120
Residual	-7,147	9,066	,000	3,056	120
Std. Residual	-2,299	2,916	,000	,983	120
Stud. Residual	-2,334	2,936	-,001	1,001	120
Deleted Residual	-7,408	9,190	-,007	3,169	120
Stud. Deleted Residual	-2,381	3,039	,000	1,010	120
Mahal. Distance	,124	12,459	3,967	2,539	120
Cook's Distance	,000	,060	,007	,010	120
Centered Leverage Value	,001	,105	,033	,021	120

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

## Charts



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



### Scatterplot

Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

